

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PASCA BENCANA BANJIR DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Nurul Aisyiah

NPP.32.0040

Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: nurulaisyiah21@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nur Ichsan Amin, SH., M.Si

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): The author focuses on the problem of the magnitude of damage and losses after the flood disaster in Langsa City. **Purpose:** This study aims to collect data that will later be analyzed to produce a picture of the rehabilitation of water resources infrastructure in Langsa City, analyze the factors that inhibit and support the implementation of policies, and efforts that can be made to overcome these inhibiting factors. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques using interviews, observations, and documentation. The data that has been collected will then be analyzed starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** From the research that the author has conducted, it shows that the implementation of post-flood disaster rehabilitation policies in Langsa City still encounters obstacles, including limited human resources, inadequate technological resources, and budget constraints. On the other hand, the formation of new organizations and appropriate regulations are supporting factors in the implementation of post-flood disaster rehabilitation. Improvements must be carried out appropriately in order to obtain optimal results in order to realize the recovery process through rehabilitation in Langsa City, namely by increasing the capacity of human resources through training to be more responsible and understand aspects of disaster, procurement of more sophisticated technology, cooperation with experts in the rehabilitation process, and fundraising efforts from the private sector. **Conclusion:** The conclusion of this study is that post-flood disaster rehabilitation in Langsa City as a whole has been carried out well, but there are several indicators that have not been implemented properly so that they become inhibiting factors in the success of this program.

Keywords: Policy Implementation, Post-Disaster Rehabilitation, Flood

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang besarnya kerusakan dan kerugian pasca bencana banjir di Kota Langsa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang nantinya akan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran tentang rehabilitasi terhadap infrastruktur sumber daya air di Kota Langsa, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat

tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa masih menemui hambatan diantaranya terkait sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya teknologi yang kurang memadai, serta keterbatasan anggaran. Di sisi lain, adanya pembentukan organisasi baru dan peraturan yang sesuai menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana banjir. Perbaikan demi perbaikan harus dilakukan secara tepat agar mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka mewujudkan proses pemulihan melalui rehabilitasi di Kota Langsa yaitu dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan agar lebih bertanggung jawab dan memahami aspek kebencanaan, pengadaan teknologi yang lebih canggih, kerja sama dengan tenaga ahli dalam proses rehabilitasi, serta upaya penggalangan dana dari pihak swasta. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yaitu rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa secara menyeluruh sudah terlaksana dengan baik namun terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik sehingga menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan program ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Pasca Bencana, Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa yang disebabkan oleh proses alam atau faktor teknologi yang membahayakan kehidupan manusia, kesejahteraan, harta benda, dan lingkungan (Serter & Gumusburun Ayalp, 2024). Banjir adalah salah satu bencana alam di mana air mengalir di luar badan air, seperti sungai (Azharia, 2021). Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling dahsyat karena mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur, korban jiwa dan luka-luka, kerugian ekonomi yang tidak terhitung banyaknya, dan gangguan sosial di seluruh dunia (Diwate et al., 2025). Pada tahapan ini fokus utamanya yaitu untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungannya. Pemulihan dilakukan melalui pengaktifan kembali lembaga-lembaga serta sarana dan prasarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Untuk mendukung tahapan ini maka dilakukan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi masyarakat seperti keadaan sebelum terjadinya bencana.

Bencana selalu memberikan dampak terhadap proses pembangunan. Bencana mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menimbulkan opini publik yang luas di dunia maya. Jika opini publik tidak dikelola secara efektif, hal itu dapat menyebabkan bencana sekunder dan kerugian lebih lanjut (Zhang et al., 2025). Infrastruktur yang telah dibangun dalam jangka waktu yang panjang dapat hancur dalam sekejap saat bencana melanda. Banjir yang terjadi di Kota Langsa telah menjadi masalah yang berulang dari tahun ke tahun. Setiap musim hujan tiba, air meluap dan merendam permukiman, jalan, serta fasilitas umum sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Secara teori bahwa pemerintahan merupakan

lembaga kenegaraan yang memiliki kewenangan dan menjalankan proses kuasa negara untuk mencapai tujuan dan fungsi negara, untuk mengsejahterakan dan menjamin keamanan rakyat, menjamin ketertiban serta keadilan sosial masyarakat (Azikin, 2018). Sayangnya, upaya untuk mencapai tujuan dan fungsi negara dengan memperbaiki infrastruktur dan membangun sistem pencegahan banjir yang memadai masih terkendala keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk penanganan darurat daripada untuk perbaikan jangka panjang. Akibatnya, kerusakan terus terjadi berulang setiap kali banjir besar datang. Hal ini memperburuk kondisi lingkungan dan membebani masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah Kota Langsa telah berupaya mengatasi permasalahan. Namun, kebutuhan yang besar tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang ada.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting yaitu jika kebijakan tidak diimplementasikan maka kebijakan itu hanya sekedar impian saja. Oleh karena itu perhatian terhadap implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas nyata dari kegiatan administratif pemerintahan setelah tahapan perumusan kebijakan yang telah disetujui atau ditetapkan (Darmawaty et al., 2020). Salah satu implementasi kebijakan pasca bencana yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan capaian sasaran secara efektif dan peningkatan partisipasi dalam mencegah dampak berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa masih mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan dalam penanganan proses rehabilitasi pasca bencana banjir ialah ketika Dana yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk penanganan darurat daripada untuk perbaikan jangka panjang. Akibatnya, kerusakan terus terjadi berulang setiap kali banjir besar datang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang analisis rehabilitasi pasca bencana maupun bahasan tentang peran pemerintah dalam rehabilitasi pasca bencana. Penelitian oleh Nastasia Thalia & Sambiran (2017) yang berjudul “Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado”, menemukan hasil bahwa masih ditemukannya faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan tahapan program ini seperti kurang perhatian dan koordinasi antara para pelaksana program, informasi yang tidak terlalu jelas, dan kurang meratanya penyaluran bantuan sehingga terjadi kecemburuan sosial diantara masyarakat. Penelitian oleh Kurnia (2017) dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat”, menemukan bahwa pemerintah membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) untuk membantu mempercepat pemulihan daerah bencana. Penelitian oleh Wahyuni et al., (2022) dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara”, menemukan hasil yaitu sebanyak 80,75 % rehabilitasi sudah berjalan dan untuk rekonstruksi berjalan sebanyak 68,58%. Dari nilai efektivitas tersebut diperoleh kendala program rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu

kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang tinggi. Penelitian oleh Wahyu Rizana dkk (2021) dengan judul "Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pascabencana Banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam", menemukan bahwa hasil efektivitas BPBD sudah efektif hal tersebut dapat diketahui dari faktor pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dilakukan BPBD pada proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat berjalan dengan baik. Penelitian oleh Dea Riska (2020) dengan judul "Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat", menemukan hasil bahwa penanggulangan pasca bencana kebakaran BPBD berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir prosesnya rehabilitasi dan rekonstruksi dan melakukan koordinasi dengan lembaga dan pihak-pihak yang terkait juga sebagai pelaksana kebijakan peraturan tentang penanggulangan bencana.

1.4. Pernyataan kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian Nastasia Thalia & Sambiran (2017) menitikberatkan pada analisis faktor pendukung atau penghambat program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado Kecamatan Paal Dua menggunakan teori Van Meter Van Horn, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir dan siapa saja yang terlibat di dalamnya dengan menggunakan teori Thomas R Dye. Kemudian penelitian Kurnia (2017) berfokus membahas aspek kebebasan diskresi (*freies ermessen*) pemerintah dalam mengambil keputusan dan tindakan saat melaksanakan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan, sedangkan penulis membahas terkait implelementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir dan siapa saja yang terlibat di dalamnya dengan menggunakan teori implementasi Thomas R Dye. Selanjutnya penelitian oleh Wahyuni et al., (2022) menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian oleh Wahyu Rizana dkk (2021) melakukan penelitian yang berfokus kepada efektivitas peran BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat, dimana berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang lebih berfokus kepada rehabilitasi infrastruktur di Kota Langsa. Kemudian penelitian Dea Riska (2020) meneliti peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kebakaran, sedangkan penulis meneliti terkait rehabilitasi dan pasca bencana banjir. Pada perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan diatas kemudian akan menghasilkan suatu pembaharuan dari segi lokus, metode penelitian, dan permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan teori-teori yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini fokusnya terletak di Kota Langsa, yang memiliki kondisi sosial, geografis, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain yang diteliti sebelumnya. Faktor-faktor lokal seperti keterlibatan masyarakat, kapasitas pemerintah daerah, dan pola kerjasama dengan lembaga non-pemerintah turut mempengaruhi implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana.

1.5. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh serta upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh.

II. METODE

Dalam penelitian terdapat dua jenis metode yang dapat digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif (Purba et al.,2011). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan sebuah permasalahan secara mendalam dan menggambarkan permasalahan sesuai fakta dengan mengumpulkan data data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi cocok dengan permasalahan yang terjadi (Simangungsong,2017). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono,2013).

Menerapkan metode penelitian kualitatif yang dikenal sebagai penelitian naturalistik yang dilakukan secara alamiah tanpa rekayasa, sehingga peneliti terlibat langsung di lapangan (Nurdin & Hartati, 2023). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bencana alam banjir di Kota Langsa. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penanggulangan banjir di Kota Langsa. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, dan Masyarakat Kota Langsa yang terdampak banjir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi menurut Dye (2017) dalam meneliti rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa. Teori ini didukung dengan lima dimensi yaitu, Organisasi Pelaksana, Pedoman atau Aturan, Anggaran Pelaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Lainnya.

3.1 Implementasi Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir Di Kota Langsa Provinsi Aceh

3.1.1 Organisasi Pelaksana

Dimensi organisasi pelaksana ini memiliki dua indikator yaitu pembentukan organisasi baru dan penambahan tugas organisasi eksisting. Pembentukan organisasi baru yaitu Forum PRB sebagai organisasi baru di BPBD dan Dewan SDA sebagai organisasi baru yang ada di Dinas PUPR memiliki peran dalam membantu pelaksanaan implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa. Sehubungan dengan terbentuknya organisasi baru yaitu Forum PRB, maka terdapat tugas tambahan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tugas Forum PRB adalah mengadakan diskusi untuk mempelajari risiko bencana di

Kota Langsa serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali dan memahami risiko bencana yang ada. Sedangkan untuk tugas tambahan pada Dewan SDA yaitu melakukan pengelolaan sumber daya air dari perencanaan hingga pemulihan, termasuk pada sumber daya air seperti sungai atau danau, serta pengelolaan sistem drainase di wilayah perkotaan.

3.1.2 Pedoman atau Aturan

Dalam dimensi pedoman atau aturan, terdapat tiga indikator yaitu pembuatan SOP, diskresi, serta pemberian sanksi. Mengenai pembuatan SOP, maka SOP yang telah selesai disusun kemudian diserahkan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan. Dalam proses pembuatannya, BPBD berpedoman pada dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan dalam pembuatan SOP untuk dinas PUPR maka berpedoman pada Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa. SOP ini berfungsi sebagai pedoman yang mendukung kelancaran proses implementasi agar lebih efisien dan efektif. Selain pembuatan SOP, indikator kedua yang menjelaskan terkait diskresi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa tidak menerapkan diskresi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan rehabilitasi membutuhkan perencanaan yang terstruktur dengan baik, mengingat besarnya anggaran yang digunakan. Indikator yang ketiga adalah adanya pemberian sanksi. Pemberian sanksi merupakan hal yang penting dalam proses implementasi rehabilitasi pasca bencana banjir. Hal ini mendorong para pegawai untuk selalu melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Suatu teguran ataupun peringatan sering kali menjadi sebuah pemicu untuk selalu memperbaiki kinerja.

3.1.3 Anggaran Pelaksanaan

Anggaran pelaksanaan pada suatu program kegiatan merujuk pada proses penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran. Anggaran dalam pelaksanaan kebijakan mengenai rehabilitasi pasca bencana di Kota Langsa ini masih menjadi salah satu hambatan dalam proses implementasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan rehabilitasi pasca bencana di Kota Langsa.

3.1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam dimensi Sumber Daya Manusia, memiliki tiga indikator yaitu rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian. Terkait pengembangan SDM, dapat diketahui bahwa telah dilakukan pengembangan SDM pada kedua OPD tersebut, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada SDM yang ada. Hal ini dilakukan karena pemerintah harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Maka dari itu, pemerintahan juga harus berkembang. Adanya pengembangan terhadap SDM ini memiliki tujuan agar SDM memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih mengenai kebencanaan. Terkait rekrutmen SDM dapat diketahui bahwa untuk pegawai di dinas terkait tidak melakukan rekrutmen terhadap masyarakat umum untuk ditugaskan menjadi petugas di dinas tersebut dan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Akan

tetapi, pemerintah sendiri yang menugaskan pegawai yang memang dirasa memahami dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini. Terkait pemberhentian SDM dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana banjir ini tidak dilakukannya pemberhentian kepada para pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi dengan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksi ini dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, yaitu karena sampai saat ini para pegawai sendiri belum melakukan kesalahan yang dapat fatal sehingga harus diberikan sanksi yang berat berupa pemberhentian. Pemberian sanksi yang tegas serta pembinaan dan pelatihan lebih lanjut dirasa lebih efektif untuk meminimalisir kesalahan.

3.1.5 Sumber Daya Teknologi

Pada dimensi Sumber Daya Teknologi ini terdapat dua indikator yakni ketersediaan infrastruktur dan ketetapan penggunaan. ketersediaan teknologi di BPBD masih sangat terbatas karena BPBD hanya memanfaatkan drone yang digunakan melalui kerja sama dengan PUPR. Sedangkan di Dinas PUPR terdapat Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Dinas terkait ini sudah berusaha untuk melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi rehabilitasi pasca bencana banjir dengan menyediakan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan mengenai rehabilitasi pasca bencana banjir. Meskipun belum sepenuhnya lengkap dan masih terdapat kekurangan, akan tetapi pemerintah Kota Langsa berusaha untuk menggunakan teknologi yang ada secara optimal.

3.2 Upaya Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa, diperlukan langkah-langkah nyata dan kolaboratif seperti, pelatihan serta pengawasan intensif guna membentuk sumber daya manusia yang lebih bertanggungjawab dan memahami mengenai kebencanaan, hingga penyediaan teknologi yang didukung oleh kerja sama dengan tenaga ahli untuk mempercepat proses rehabilitasi. Selain itu, penggalangan dan pengajuan dana kepada pihak swasta juga menjadi solusi penting dalam memastikan keberlanjutan program rehabilitasi pasca bencana banjir. Dengan hal ini, kita dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang rusak melalui rehabilitasi pasca bencana banjir yang lebih efektif, tangguh, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat dan lingkungan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada Penelitian ini penulis membahas mengenai kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa Provinsi dengan menggunakan teori Implementasi Thomas R Dye (2017). Pada Penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa sudah terlaksana dengan baik berdasarkan dimensi dan indikator dalam teori yang penulis gunakan untuk meneliti. Yaitu terdapat pembentukan organisasi baru seperti Forum PRB di BPBD dan Dewan SDA di Dinas PUPR. Hal ini sama dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Kurnia (2017) yang membahas mengenai aspek kebebasan diskresi (*freies ermessen*) pemerintah dalam mengambil keputusan dan tindakan saat melaksanakan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu dengan membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) untuk membantu mempercepat pemulihan daerah bencana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Langsa dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa sudah terlaksana dengan baik berdasarkan dimensi dan indikator dalam teori yang peneliti gunakan untuk meneliti. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang masih harus perlu untuk diperbaiki serta ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal seperti, ketersediaan teknologi yang masih kurang, anggaran yang terbatas, dan peran SDM masih dinilai kurang. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa, diperlukan langkah-langkah nyata dan kolaboratif seperti, pelatihan serta pengawasan intensif guna membentuk sumber daya manusia yang lebih bertanggungjawab dan memahami mengenai kebencanaan, penyediaan teknologi, serta penggalangan dan pengajuan dana.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait dengan durasi pelaksanaannya yang hanya berlangsung selama dua minggu. Keterbatasan waktu tersebut mengakibatkan penulis memiliki keterbatasan dalam melakukan observasi terhadap kegiatan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa.

Arah Masa Depan Penelitian (future work).

Penulis berharap penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan dan lokasi yang sama dapat dilakukan secara lebih mendalam dan menyeluruh pada seluruh aspek yang berkaitan di Kota Langsa karena temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Penelaah yang telah berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa dan seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selama wawancara berlangsung, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharia Sabitah, S. (2021). Jurnal Geografi. *Jurnal Geografi*, XIX, 35–48.
<https://doi.org/10.26740/jggp.v19n2.p61-68>
- Azikin, A. (2018). Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098>
- Darmawaty, Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII, 130–143.
<https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i1.1349>
- Diwate, P., Lavhale, P., Pande, C. B., Sammen, S. S., Refadah, S. S., Khan, M. Y. A., Elkharchy, I., & Salem, A. (2025). Evaluating flood dynamics and effects in Nagpur city using remote sensing and Shannon's entropy analysis. *Scientific Reports*, 15(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-86801-6>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc
- Kurnia, M. L. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 76–91. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- Nastasia Thalia, & Sambiran, S. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
<https://doi.org/10.54836/widyanata.v20i2.1151>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In S. H. Lutfiah (Ed.), *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Media Sahabat Cendekia.
<https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Purba, Elvis F., & Simanjuntak, P. (2011). *Metode Penelitian*. Percetakan SADIA.
- Riska, D. (2020). Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–155.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51597>
- Rizana, W., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Peran Bpbd Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 193–199.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2112>
- Serter, M., & Gumusburun Ayalp, G. (2024). A Holistic Analysis on Risks of Post-Disaster Reconstruction Using RStudio Bibliometrix. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Issue 21). <https://doi.org/10.3390/su16219463>

- Simangunsong, F. (2017). *Metedologi Penelitian Pemerintahan* (pertama). alfabeta .
- Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif R&D. In *Metode Penelitian Kualitatif R&D, Alvabeta, Bandung* (8th ed.). Alfabeta.
- Wahyuni, I., Aziz, F., & Budiharto, T. (2022). Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 198–207. <https://doi.org/10.35965/jups.v2i2.297>
- Zhang, Y., Tang, W., & Ni, T. (2025). A public opinion propagation model for technological disasters. *Scientific Reports*, 15(1), 1–21. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91244-0>

